

Pelaksanaan Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri oleh Kementerian Perindustrian

Implementation of The Industrial Technology Improvement Partnership Fund Programme by The Ministry Of Industry

Amirullah^{a*}, Muhadam Labolo^b, Dyah Poespita Ernawati^c

Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia^{a,b,c}
mtsp.40.3463@ipdn.ac.id; muhadam@ipdn.ac.id; dyah.poespita1968@gmail.com

Abstract

Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) merupakan salah satu fasilitas yang diselenggarakan oleh Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Jasa Industri (POPTIKJI) pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan administratif maupun teknis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program DAPATI, mengidentifikasi kendala dan/atau hambatan yang dihadapi, dan merumuskan upaya untuk memperkuat pelaksanaannya. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang memandang keberhasilan program dari dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dari beberapa informan yang bertugas di Kementerian Perindustrian dan IKM penerima fasilitas DAPATI serta telaah dokumen. Data dianalisis melalui tahapan mengkode data, mengkategorisasi data, dan tematisasi data dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAPATI telah memberikan manfaat nyata bagi IKM melalui bantuan konsultasi dan pendampingan teknis, tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh posisi program dalam struktur kebijakan dan penganggaran, tata kelola administratif, kapasitas pelaksana program, serta karakteristik IKM. Untuk memperkuat program, diperlukan penguatan posisi DAPATI dalam dokumen perencanaan dan kinerja Kemenperin, sinergi kelembagaan lintas unit dan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas SDM Balai dan IKM, serta pengembangan sistem informasi dan monitoring evaluasi yang lebih komprehensif. Temuan ini diharapkan menjadi masukan untuk pengembangan program dan pengembangan IKM di Indonesia.

Kata Kunci: Program DAPATI; Implementasi kebijakan; Industri Kecil dan Menengah (IKM); Fasilitasi teknologi industri; Model Grindle.

Abstract

The Industrial Technology Improvement Partnership Fund Program (DAPATI) is a facility implemented by the Centre for Optimisation of Industrial Technology Utilisation and Industrial Services (POPTIKJI) under the Agency for Industrial Standards and Policy (BSKJI), Ministry of Industry (Kemenperin), to improve the productivity and competitiveness of Small and Medium Industries (IKM). However, in its implementation the program still faces various administrative and technical constraints. This study aims to describe and analyse the implementation of the DAPATI Program, identify the constraints and/or obstacles encountered, and formulate efforts to strengthen its implementation. The analysis employs Merilee S. Grindle's policy implementation model, which views program success through the dimensions of policy content and implementation context. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with several informants at the Ministry of Industry and IKM receiving DAPATI facilities, as well as document review. The data were analysed through stages of coding, categorising, and thematising with the assistance of ATLAS.ti software. The findings show that DAPATI has provided tangible benefits for IKM through consultancy services and technical mentoring, yet its implementation remains constrained by the program's position within the policy and budgeting structure, administrative governance, the capacities of program implementers, and the characteristics of IKM. To

<https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

strengthen the program, it is necessary to reinforce DAPATI's position in Kemenperin's planning and performance documents, enhance institutional synergy across units and with local governments, improve the capacities of Balai and IKM human resources, and develop more comprehensive information, monitoring, and evaluation systems. These findings are expected to contribute to program development and the strengthening of IKM in Indonesia.

Keywords: DAPATI Program; Policy implementation; Small and Medium Industries (IKM); Industrial technology facilitation; Grindle's model

1. Pendahuluan

Karakteristik negara-negara dunia ketiga ditandai oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, kesempatan kerja dan lapangan kerja terbatas, pengangguran dan kemiskinan relatif tinggi, serta pendapatan rendah. Hal ini berdampak terhadap rendahnya daya beli masyarakat, rata-rata tingkat pendidikan dan kualitas hidup rendah. Salah satu sektor yang berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di banyak negara adalah sektor industri karena berdampak langsung pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah (*value added*).

Melalui kesempatan kerja yang tinggi, pemerataan distribusi pendapatan dapat dioptimalkan dan mampu menekan kemiskinan sehingga secara nasional struktur perekonomian menjadi kokoh. Sedangkan untuk nilai tambah, yang secara sederhana berarti selisih antara nilai *output* (produk atau jasa akhir) dengan biaya bahan baku atau *input* lain yang digunakan dalam proses produksi (Syofya, 2024). Dengan demikian, semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan, maka akan terjadi peningkatan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga akan menambah keuntungan ekonomi dan manfaat yang dapat dinikmati oleh pelaku industri dan masyarakat (konsumen) yang berujung pada meningkatnya ketahanan perekonomian.

Sektor industri di Indonesia telah membangun perekonomian nasional selama bertahun-tahun. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang dengan nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya jasa industri. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB (lihat Gambar 1.1). Industri manufaktur secara konsisten mencatatkan kontribusi tertinggi terhadap PDB, dengan porsi mencapai kisaran 19-20 persen sepanjang 2020-2024.

(Dahmiri dkk., 2024) menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan IKM sangat dipengaruhi oleh kolaborasi lintas pihak yaitu pemerintah, kalangan akademisi, pelaku industri besar, masyarakat, dan lingkungan sosial. Sinergi di antara lima pemangku kepentingan tersebut diyakini berperan strategis dalam meningkatkan produksi dan penjualan berbagai produk IKM. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah bertindak sebagai fasilitator dengan menyusun regulasi yang mendukung pengembangan dan penerapan teknologi, menyediakan insentif, serta memastikan infrastruktur termasuk jaringan internet dan layanan publik berjalan efisien. Akademisi berkontribusi melalui riset terapan, pendidikan, serta pemutakhiran teknologi yang dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat literasi digital masyarakat. Sementara itu, pelaku industri besar menggerakkan investasi dan inovasi dengan menyediakan modal, infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM) berkualifikasi, sekaligus mentransfer pengetahuan praktis pada IKM. Adapun masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai konsumen, melainkan turut aktif dalam memberikan umpan balik, mempromosikan produk lokal, dan mendorong keberlanjutan permintaan pasar. Terakhir, lingkungan sosial yang mencakup komunitas lokal dan media membangun kesadaran serta penerimaan inovasi, menyediakan pelatihan, dan meningkatkan kapasitas pengusaha dalam mengadopsi teknologi.

Namun, (BPS, 2024) menunjukkan bahwa dari total 4,50 juta Industri Mikro dan Kecil (IMK), sekitar 68,05 persen IMK masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya

karena umumnya terkendala permodalan dan pemasaran, serta akses bahan baku (lihat Gambar 1.3 hal. 6). Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nazifah & Ikhwan, 2021) di Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang yang mengidentifikasi kendala yang paling banyak ditemukan adalah pembukuan, permodalan, dan pemasaran. Selain itu, di dalam hasil penelitian lainnya ditemukan bahwa IKM juga terkendala dengan kualitas produk yang belum sesuai pasar, jaringan usaha kecil, mental SDM yang lemah, sarana yang masih tradisional, pencatatan pembukuan yang belum diatur dan kemampuan mengoperasikan teknologi masih rendah, serta minimnya kemampuan mengakses informasi. Penelitian (R. A. Putra dkk., 2021) juga mengungkapkan terdapat kendala serupa terkait keterbatasan permodalan, SDM yang belum optimal, akses bahan baku, dan memasarkan produk.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Program DAPATI dalam kurun waktu empat tahun terakhir juga menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP 2021-2024) banyak ditemukan kendala yang bersifat teknis maupun administratif (POPTIKJI, 2022-2025). Dalam dokumen tersebut dikatakan terdapat kendala seperti pengiriman dokumen *hardcopy* dari daerah ke pusat, dokumen yang dikirimkan oleh Balai terkadang tidak terdata dengan baik sehingga memungkinkan dokumen terselip atau terlewat saat penyusunan laporan pertanggungjawaban yang menghambat kelancaran administrasi (POPTIKJI, 2022-2023). Adapun untuk kendala teknis seperti sulitnya mendapatkan transportasi umum di beberapa lokasi IKM menghambat pelaksanaan dan *monitoring* kegiatan (POPTIKJI, 2022-2023) serta terdapat proposal DAPATI yang mundur dan gagal, sehingga pencapaian target kinerja organisasi menjadi tidak optimal (POPTIKJI, 2023-2024).

Selain itu, dalam pengumpulan data dan *monitoring* pelaksanaan program juga kurang efektif yang berdampak pada terhambatnya pencapaian sasaran kegiatan (POPTIKJI, 2023-2024). Terdapat juga seleksi proposal DAPATI 2024 dan *conference awards* mengalami penundaan karena adanya blokir anggaran, sehingga jadwal pelaksanaan yang direncanakan pada akhir November 2023 tidak terealisasi (POPTIKJI, 2024). Di sisi lain, kapasitas SDM di Balai masih memerlukan peningkatan agar mampu melakukan analisis kebutuhan dan permasalahan IKM secara lebih tepat sasaran. Tantangan geografis juga cukup signifikan, dengan ketimpangan distribusi manfaat yang terjadi, terutama di daerah terpencil seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Meskipun 62% IKM berasal dari luar Pulau Jawa, penerimaan manfaat teknologi masih belum merata ke wilayah-wilayah tersebut (POPTIKJI, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi seluruh kendala ini agar program DAPATI mampu mencapai tujuan secara optimal.

Para ahli memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam mendefinisikan konsep implementasi, namun secara umum dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu ilmu implementasi dan implementasi kebijakan. Ilmu implementasi menyoroti proses bagaimana intervensi tertentu dapat menghasilkan perubahan yang nyata. Fixsen dkk. (Signe, 2017) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian tindakan yang dirancang dengan jelas agar suatu program atau kegiatan dapat dijalankan dengan terukur. Meyers dkk. (Signe, 2017) menambahkan bahwa implementasi mencakup tahapan dari mulai diterimanya inovasi hingga akhirnya menjadi praktik rutin. Menurut Durlak dan DuPre (Signe, 2017) implementasi berkaitan dengan bagaimana program disampaikan dalam konteks tertentu, sementara Domitrovich dkk. (Signe, 2017) melihat implementasi sebagai periode antara keputusan adopsi dan integrasi formal ke dalam sebuah sistem. Burke dkk. (Signe, 2017) menyatakan bahwa implementasi berlaku dalam berbagai sektor, sehingga mencakup hampir semua pelaksanaan tindakan atau rencana.

Dalam konteks implementasi kebijakan, Pressman dan Wildavsky (Signe, 2017) menggambarkan implementasi sebagai kemampuan menghubungkan berbagai tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mazmanian dan Sabatier (Signe, 2017) memperjelas definisi ini dengan mengungkapkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang umumnya tertuang dalam undang-undang atau berbentuk perintah-

perintah eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Wandersman dkk. (Signe, 2017) menegaskan bahwa implementasi bukan hanya tentang "apa" yang perlu dilakukan, tetapi juga tentang "bagaimana" suatu kebijakan tersebut diwujudkan dalam praktik nyata.

Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, ilmu implementasi maupun implementasi kebijakan memiliki persamaan dalam mengidentifikasi dimensi atau variabel yang menentukan keberhasilan proses implementasi, namun keduanya berbeda secara metodologi. Ilmu implementasi cenderung kuantitatif dengan variabel yang jelas dan terpisah, sedangkan studi implementasi kebijakan lebih bersifat kualitatif karena mengandalkan observasi terhadap eksperimen alamiah (Signe, 2017).

Implementasi kebijakan adalah proses penting yang memastikan kebijakan publik terwujud dalam tindakan nyata sesuai tujuan yang telah direncanakan. Menurut (Grindle, 1980: 7) keberhasilan implementasi sangat bergantung pada adanya kejelasan tujuan, program kerja yang terstruktur, dan dukungan pendanaan yang memadai. Van Meter dan Van Horn (Wibawa dkk., 1994: 15) menegaskan bahwa implementasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok di sektor swasta. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (Signe, 2017) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang atau peraturan eksekutif, melalui beberapa tahap yang terstruktur, mulai dari penetapan kebijakan hingga evaluasi dampaknya. Pressman dan Wildavsky (Rokhman, 2022) juga mendefinisikan implementasi adalah "melaksanakan, memenuhi, menghasilkan, dan menyelesaikan sebuah kebijakan. Jadi, tindakan implementasi terkait dengan adanya kebijakan. Jika tidak ada kebijakan, maka tidak akan ada implementasi. Bagi Pressman dan Wildavsky (Rokhman, 2022), implementasi tidak bisa dipisahkan sebagai rangkaian dalam kebijakan". Di sisi lain, implementasi bisa dilaksanakan jika ada dasarnya, misalnya undang-undang dan perangkat awal seperti pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan. Jadi, implementasi tidak bisa hadir tanpa dasar awal kebijakan.

Dengan pemahaman tersebut, pelaksanaan Program Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) oleh POPTIKJI di Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian merupakan bentuk nyata dari proses implementasi kebijakan. Program ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Nomor 144 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 15 dan 36 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian Industri Kecil Menengah (IKM). Implementasi program ini secara ideal akan menghasilkan efek langsung berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada IKM, serta dampak jangka panjang dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian IKM.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan sesuai rencana karena berbagai tantangan. Hogwood dan Gunn (Ditlopo dkk., 2013; Marsuyetno & Harahap, 2023; Tinolah, 2016) menyebutkan dua penyebab utama kegagalan kebijakan, yaitu *non implementation* (tidak dilaksanakan atau pelaksanaan tidak sesuai rencana) dan *unsuccessful implementation* (pelaksanaan gagal mencapai tujuan karena kondisi eksternal yang tidak mendukung). Menurut Dunsire (Abdul, 2019), perbedaan antara perencanaan dengan realitas ini disebut sebagai "*implementing gap*" atau kesenjangan implementasi. Lebar atau sempitnya kesenjangan ini bergantung pada kemampuan organisasi atau aktor pelaksana, yang disebut Williams (Marsuyetno & Harahap, 2023) sebagai "*implementation capacity*".

Dengan demikian, analisis menggunakan model implementasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui dan memahami sejauh mana Program DAPATI berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan kebijakan. Melalui analisis tersebut, berbagai faktor pendukung

dan penghambat implementasi dapat diidentifikasi, sehingga pelaksanaan program dapat lebih efektif dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ahli telah memberikan definisi mengenai kebijakan dan program, hal ini karena tak lepas keterkaitan antara keduanya. Dan ini menunjukkan kebijakan dan program telah lama menjadi bidang kajian ilmiah. Eyestone (Wibawani dkk., 2021) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, yang membahas hubungan antara satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Adapun Dye (Khasna, 2021) melihatnya sebagai pilihan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Sementara itu Peters (Alfiah dkk., 2024) menekankan pada aktivitas pemerintah baik langsung maupun melalui perantara yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah aktivitas pemerintahan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut (Hamdi, 2015: 1 & 33) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah hasil (output) dari proses pemerintahan, selain pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Laswell dan Kaplan (Tasya dkk., 2022) mengartikan kebijakan publik sebagai program pencapaian tujuan dan nilai melalui praktik terarah. Sedangkan Kraf & Furlong (Yolanda, 2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan (atau tidak adanya tindakan) pemerintah yang diambil dalam menanggapi masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang secara luas dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat dan oleh karena itu membutuhkan intervensi. Dengan demikian, kebijakan publik mencerminkan suatu kerangka tindakan yang terarah dan terencana dalam upaya menyelesaikan permasalahan publik, sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara kebijakan dan program sebagai instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Arikunto dan Jabar (Muryadi, 2017), konsep program dapat dipahami dari dua perspektif, yakni secara umum dan khusus. Secara umum, program didefinisikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan secara khusus program merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, memerlukan waktu yang panjang, serta dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dalam suatu sistem yang saling terkait. Selanjutnya Sukardi (Almaajid dkk., 2024) menegaskan bahwa program adalah suatu kebijakan atau serangkaian kegiatan yang dijalankan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, di mana setiap kegiatan tersebut disepakati oleh manajemen dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Smith (Mahmudi, 2011) mendefinisikan program sebagai rangkaian aktivitas yang direncanakan dan diarahkan dengan tujuan untuk membawa perubahan tertentu pada *audiens* yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, definisi program menurut para ahli menggambarkan bahwa program merupakan wujud konkret dan terstruktur dari kebijakan yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkesinambungan untuk mencapai perubahan yang terukur pada audiens yang telah diidentifikasi.

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program merupakan dua elemen yang saling berintegrasi dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan memiliki karakteristik makro, normatif, serta abstrak, yang berfungsi sebagai arahan strategis dan pedoman umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, program hadir sebagai wujud nyata dari kebijakan, yang sifatnya lebih mikro, teknis, dan konkret, dengan rancangan kegiatan yang jelas, terstruktur, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sinergi antara kebijakan dan program ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menjawab berbagai permasalahan, menuju ke arah perubahan yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

2. Metode

Menurut (Creswell, 2016) dalam bukunya yang berjudul "*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*" menyatakan bahwa: "Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan". (Creswell, 2016: 4-5).

"Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Menulis bagian metode-metode untuk proposal penelitian kualitatif mewajibkan pembaca-pembaca berpendidikan sesuai dengan maksud penelitian, menyebutkan rancangan khusus, dengan hati-hati merefleksikan peran peneliti dalam penelitian, menggunakan daftar jenis sumber data yang tidak ada habisnya. Menggunakan protokol khusus untuk merekam data, menganalisis (Creswell, 2016: 245)

Oleh karena itu, pada penelitian ini metode dan pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif karena metode pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam makna, pengalaman, dan dinamika pemerintahan dalam proses implementasi kebijakan yang melekat pada pelaksanaan Program Peningkatan Teknologi Industri dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi industri pada IKM oleh Kementerian Perindustrian.

Dengan kerangka kerja yang fleksibel dan induktif, peneliti dapat merumuskan pertanyaan terbuka, merekam data berbentuk narasi, dokumen, serta gambar, lalu menata temuan secara bertahap dari tema spesifik hingga simpulan konseptual sehingga kompleksitas proses implementasi dan variasi respons para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersaji apa adanya.

Pendekatan ini juga menuntut refleksi kritis peran peneliti dan penggunaan protokol pencatatan data yang sistematis, sehingga kredibilitas analisis tetap terjaga. Dengan kata lain, karena program ini beroperasi dalam konteks pemerintahan yang berlapis dan melibatkan perubahan perilaku teknologi pada IKM, metode kualitatif paling tepat untuk menangkap makna subjektif, usaha pembuat kebijakan (*policy makers*), serta hambatan (*barriers*) dan peluang (*opportunities*).

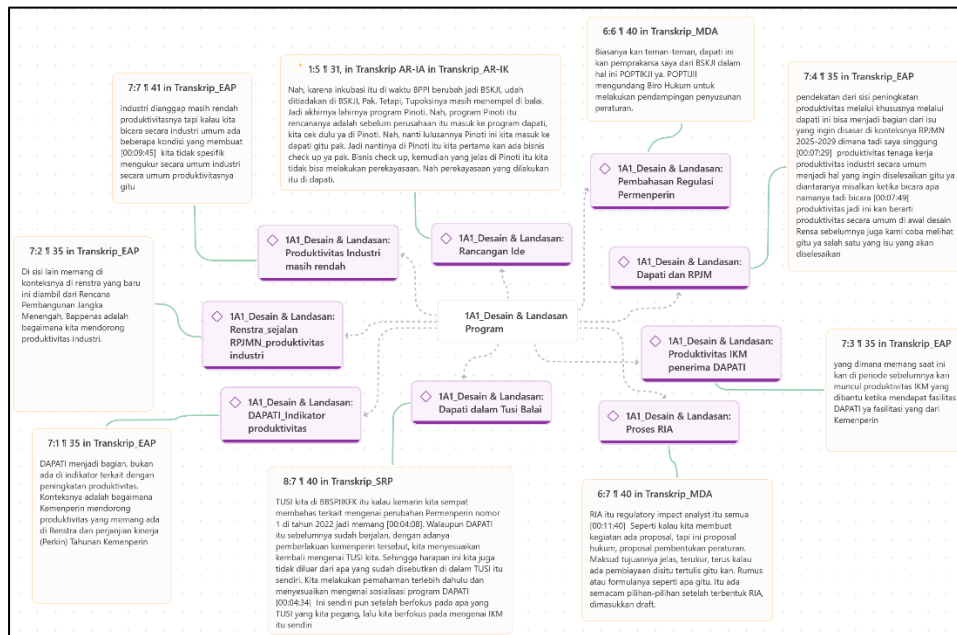
3. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Program DAPATI oleh POPTIKJI di BSKJI Kemenperin

Dari hasil penelitian yang dilakukan, proses pelaksanaan Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) oleh POPTIKJI di lingkungan BSKJI Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dipahami sebagai rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, rekrutmen peserta, seleksi IKM, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta hasil pelaksanaan. Proses tersebut disusun berdasarkan data hasil wawancara dengan informan yang bertugas pada POPTIKJI dan Balai di BSKJI Kemenperin, Biro Perencanaan (Rocana) dan Biro Hukum (Rokum) di Setjen Kemenperin, serta IKM penerima fasilitas DAPATI, ditambah dengan telaah dokumen. Kemudian data tersebut dianalisis melalui tahapan pengkodean data (*coding*), kategorisasi (*axial coding*), dan tematisasi. Adapun hasil analisis pelaksanaan program DAPATI berdasarkan data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini :

Desain dan Landasan Program

Gambar 4. 1 Network view Kategori Desain dan Landasan Program



Desain dan landasan program dipahami sebagai ide pelaksanaan dan penyesuaian dasar hukum. Proses desain dan landasan tersebut merupakan rancangan ide awal program DAPATI yang diinisiasi oleh POPTIKJI. Hal ini disampaikan oleh IK selaku pejabat analisis kebijakan di POPTIKJI yang mengatakan bahwa: “Sejak BPPI berubah menjadi BSKJI, program inkubasi sudah tidak dilaksanakan lagi di BSKJI. Namun, sebagian tugas dan fungsinya masih ada di Balai. Dari situ kemudian muncul Program PINOTI. PINOTI dirancang sebagai tahap awal sebelum perusahaan masuk ke DAPATI. Di PINOTI dilakukan business check-up untuk menilai kesiapan perusahaan. PINOTI tidak mencakup perekayasa. Perekayasa dilakukan pada tahap DAPATI, setelah perusahaan dinyatakan lulus dari PINOTI.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh SRP selaku pejabat pembina industri yang ada pada BBSPJIKFK yang mengatakan bahwa: “Tusi kita di BBSPJIKFK, kita sempat membahas terkait mengenai perubahan Permenperin Nomor 1 di Tahun 2022. Jadi memang walaupun DAPATI itu sebelumnya sudah berjalan, dengan adanya pemberlakuan Permenperin tersebut, kita menyesuaikan kembali mengenai tusi kita. Sehingga harapan ini kita juga tidak diluar dari apa yang sudah disebutkan di dalam tusi itu sendiri. Kita melakukan pemahaman terlebih dahulu dan menyesuaikan mengenai sosialisasi program DAPATI. Ini sendiri pun setelah berfokus pada apa yang tusi yang kita pegang, lalu kita berfokus pada mengenai IKM itu sendiri.”

Dari kedua kutipan di atas peneliti memahami bahwa terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemenperin sehingga mengubah BPPI yang memiliki tusi di bidang penelitian dan pengembangan industri (litbang) kemudian bertransformasi menjadi BSKJI. Penjelasan tersebut diperkuat adanya dokumen Permenperin 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenperin yang sebelumnya diatur di dalam Permenperin 35 Tahun 2018. Dengan adanya perubahan aturan tersebut maka terjadi perubahan pada tusi POPTIKJI sekaligus mengganti nama yang sebelumnya adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (PFKLMATE) serta 24 Balai yang merupakan UPT di lingkungan BSKJI diantaranya adalah BBSPJIKFK yang dulunya adalah Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK).

melalui Biro Hukum. Hal tersebut disampaikan : “DAPATI diinisiasi oleh POPTIKJI, tapi untuk koordinasi, pembentukan peraturan, dan harmonisasi dilakukan oleh Biro Hukum”

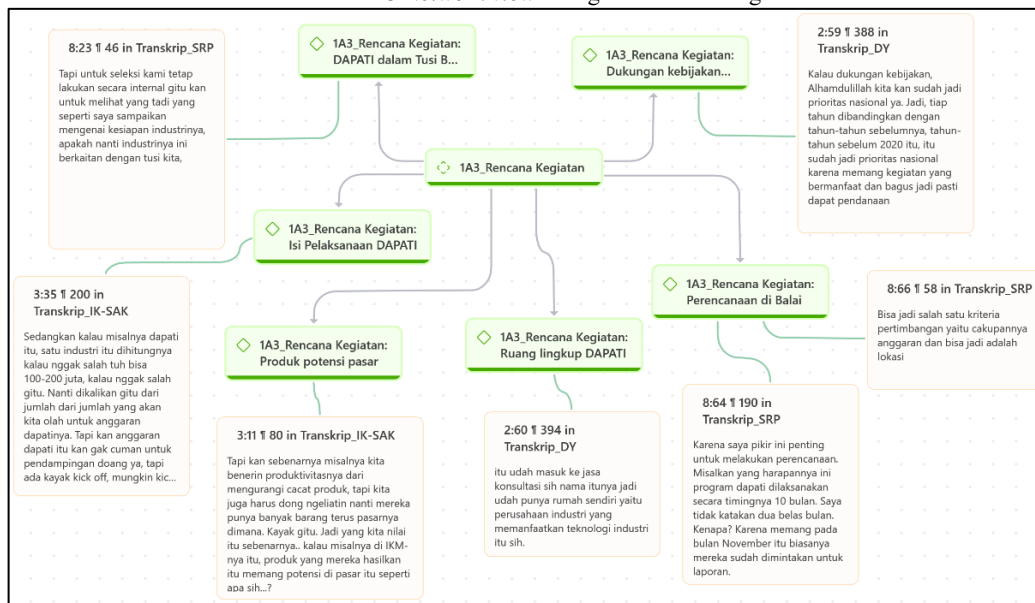
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Rokum bertindak sebagai penjaga proses pembentukan regulasi, memastikan bahwa desain program DAPATI yang diusulkan POPTIKJI sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Kemenperin. Dalam konteks ini, Rokum menjadi aktor penting dalam tata kelola program dari sisi hukum. Selain aspek hukum, Rocana juga memainkan peran kunci dalam melihat keselarasan DAPATI dengan sasaran kinerja Kementerian dan dalam menilai status program sebagai program prioritas. EAP sebagai Pejabat Fungsional Perencana menjelaskan bahwa: “Jadi untuk menilai program sebagai prioritas, Biro Perencanaan tentu kita melihat keselarasan”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rocana berperan untuk menilai apakah program DAPATI selaras dengan sasaran strategis Kemenperin. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa Program DAPATI yang dilakukan POPTIKJI dan Balai telah selaras dengan sasaran strategis nasional (RPJMN) dan Renstra Kemenperin. Hal tersebut dapat dilihat melalui pohon dan matriks kinerja POPTIKJI dan BBSPJIKFK yang terdapat dokumen Renstra POPTIKJI dan Renstra Balai dalam hal ini adalah BBSPJIKFK.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) yang terlibat dalam mereviu aspek penganggaran dan pelaksanaan program. EAP di Biro Perencanaan juga menyebutkan bahwa: “Inspektorat Jenderal (Itjen) nanti akan melihat *scope* dari penganggaran dan segala macam.” Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola program, Itjen berfungsi sebagai pihak yang mengawasi dan menilai kewajaran serta kepatuhan penganggaran dan pelaksanaan DAPATI terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, Rocana dan Itjen membentuk mekanisme cek dan keseimbangan dari sisi perencanaan dan pengawasan.

Rencana Kegiatan

Gambar 4. 3 *Network view* Kategori Rencana Kegiatan



Rencana kegiatan dalam penelitian ini dipahami sebagai rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan melalui Program DAPATI, baik di tingkat pusat maupun Balai. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyusunan rencana kegiatan DAPATI dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, fokus produktivitas IKM, dan penyesuaian dengan tusi Balai. DY menjelaskan bahwa DAPATI mendapat dukungan sebagai program prioritas sehingga

kegiatan yang direncanakan relatif didukung secara kebijakan dan pendanaan: “Kalau dukungan kebijakan, Alhamdulillah kita kan sudah jadi prioritas, selama kegiatannya bermanfaat dan bagus jadi pasti dapat pendanaan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, Program DAPATI memperoleh dukungan kebijakan yang memadai karena telah diposisikan sebagai program prioritas. Status sebagai program prioritas ini penting karena memberikan keutamaan dalam alokasi pendanaan, sehingga POPTIKJI memiliki kepastian dan keleluasaan yang lebih besar dalam merencanakan, mengusulkan, dan melaksanakan kegiatan DAPATI.

Rencana kegiatan DAPATI pada tingkat pelaksanaan teknis di Balai dirumuskan dalam bentuk jasa konsultansi dan pendampingan teknologi. DY menjelaskan bahwa ruang lingkup DAPATI masuk ke dalam jasa konsultansi: “Itu sudah masuk ke jasa konsultansi, jadi sudah memiliki rumah akun anggaran sendiri yaitu jasa konsultansi untuk perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri.” Kutipan ini menggambarkan bahwa program DAPATI di Balai merupakan jasa konsultansi dan pendampingan kepada perusahaan industri (khususnya IKM) yang ingin memanfaatkan teknologi industri. Artinya pelaksanaan program DAPATI di Balai menjadi sebuah layanan jasa industri. Hanya saja perbedaan dengan program DAPATI adalah adanya subsidi yang diberikan oleh POPTIKJI.

Dari sisi permasalahan industri, rencana kegiatan program DAPATI tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis di proses produksi, tetapi juga mempertimbangkan potensi pasar dari produk yang dihasilkan IKM. DY menjelaskan: “Tapi sebenarnya apabila kita memperbaiki produktivitasnya dari sisi proses, dari produk yang mereka hasilkan itu memang kita juga melihat bagaimana potensi produk tersebut di pasar”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana kegiatan, tim DAPATI tidak hanya melihat dari sisi produktivitas calon peserta, tetapi juga mempertimbangkan apakah produk yang dihasilkan memiliki peluang di pasar. Sehingga pendampingan yang direncanakan tidak berhenti pada penyelesaian masalah produksi, tetapi diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha melalui peningkatan daya saing produk di pasar. Secara operasional, rencana kegiatan DAPATI disusun dengan menghitung seluruh kebutuhan pendampingan yang diperlukan untuk satu industri dalam satu tahun anggaran. DY menjelaskan: “Sedangkan DAPATI, anggarannya dihitung berdasarkan satu industri dirinci dari total kebutuhan pendampingan. Jadi di awal kita melihat apa saja yang mau dilakukan di industri tersebut, berapa kali kunjungan, pendampingan apa saja, sampai nanti ada kunjungan untuk monev.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa rencana kegiatan disusun secara spesifik per IKM, mulai dari jumlah kunjungan, bentuk pendampingan, hingga alokasi kegiatan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, satu “paket” DAPATI untuk satu IKM mencerminkan keseluruhan rangkaian aktivitas yang telah direncanakan sejak awal. Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan, Balai akan melakukan seleksi internal terhadap IKM yang akan didampingi, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik industri dengan visi Balai. Penjelasan tersebut disampaikan SRP selaku pejabat pembina industri di Balai yang mengatakan: “Tapi untuk seleksi kami tetap lakukan secara internal. Untuk pelaksanaannya, apakah kemudian industrinya ini berkaitan dengan visi kita.” Hal ini menunjukkan bahwa rencana kegiatan DAPATI di Balai tidak hanya memuat daftar aktivitas, tetapi juga memuat penentuan sasaran IKM yang relevan dengan kompetensi dan mandat teknis Balai karena setiap Balai yang ada di BSKJI memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

4. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan pelaksanaan Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) oleh Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI) di lingkungan BSKJI Kementerian Perindustrian, mengidentifikasi berbagai kendala dan/atau hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut.

Kesimpulan berikut disusun sebagai jawaban ringkas, jelas, dan sistematis atas rumusan masalah penelitian. 1) Pelaksanaan Program DAPATI oleh POPTIKJI di BSKJI Kemenperin, penelitian ini menyimpulkan bahwa DAPATI merupakan program fasilitasi teknologi dan jasa konsultansi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu, dan daya saing IKM melalui pendampingan teknis yang komprehensif. Dari sisi isi kebijakan (*content of policy*), DAPATI telah memiliki sasaran yang jelas (IKM), tipe manfaat yang konkret (teknologi, perbaikan proses, SOP, peningkatan kompetensi), dan mekanisme pelaksanaan yang menggabungkan bantuan alat dan pendampingan. Pelaksanaan program melibatkan jejaring aktor yang luas, dengan POPTIKJI sebagai koordinator, Balai sebagai pelaksana teknis di lapangan, dan dukungan unit lain seperti Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan Inspektorat Jenderal. Rekrutmen dan seleksi IKM dilaksanakan melalui kombinasi sosialisasi, basis data IKM binaan, dan layanan rutin Balai, kemudian diikuti proses pendampingan yang mencakup identifikasi masalah, perancangan solusi, perekayasa dan instalasi teknologi, hingga monitoring dan evaluasi; 2) Terkait kendala dan/atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program DAPATI, penelitian ini menemukan bahwa tantangan muncul pada beberapa level sekaligus. Dari sisi kebijakan dan penganggaran, posisi DAPATI yang masih berada pada level BSKJI/POPTIKJI dan belum sepenuhnya menjadi indikator kinerja utama di level kementerian berimplikasi pada fluktuasi dan keterbatasan anggaran, termasuk potensi pemotongan dan blokir yang mempengaruhi skala dan tempo pelaksanaan program. Dari sisi tata kelola, prosedur administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang kompleks menambah beban pelaksana dan memperpendek waktu efektif pendampingan di IKM. Dari sisi kelembagaan, kapasitas SDM di Balai belum merata dan harus berbagi perhatian dengan layanan rutin lainnya, sehingga intensitas dan kedalaman pendampingan tidak selalu ideal. Di tingkat sasaran, keterbatasan modal, kapasitas manajerial, serta perbedaan kesiapan teknologi dan lokasi geografis IKM menimbulkan variasi dalam kemampuan mereka untuk memenuhi skema *cost sharing* dan mempertahankan pemanfaatan teknologi baru dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari, Penerj.). Dalam Amaryllis (Ed.), *Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (4 ed.). Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Dalam *CQ Press Washington, DC*, page (Nomor 53). Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi* (R. Sikumbang, Ed.; Kedua). Ghalia Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya. https://lib.algazali.ac.id/assets/uploads/ebook/Buku_Kebijakan_Publikcetak.pdf
- Labolo, M. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Awal* (Y. S. Hayati, Ed.; 9 ed.). PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN*, 9, 50–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420>
- Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 1–1. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869>

- Ahsan, S. C., Ryadi, S., Kadoy, A. A., & Niswaty, R. (2019). The Implementation of Public Information Disclosure Policy in Sigi Regency, Central Sulawesi, Indonesia. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 3(2), 113–120. <https://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/131>
- Alfiah, R., Sabrina, J. A., Fiyara, N. S., Hidayat N, R., & Kusumasari, I. R. (2024). Adaptive Systems and Decision-Making: Innovations in Policy Analysis for Public Transportation in Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.47134/par.v2i2.3478>
- Almaajid, R., Aidin, W., Sholehah, D., Pradita, S., & Arifandi, R. (2024). Evaluasi Program Pendidikan dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Disekolah SMP Negeri 1 Hamparan Perak. Dalam *ALACRITY: Journal Of Education* (Vol. 4). <http://lppipublishing.com/index.php/alacrity>
- Amy, Rahayu, Y. S., Maksum, R. I., & Kusumawardhani, D. (2018). Technology Diffusion Challenges for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Developing Countries: Case Study of the Appropriate Technology for MSMEs Program (Iptekda) in West Java-Indonesia (The paper is part of a Dissertation with the title of Technology Diffusion Implementation Policy Analysis : Case Study Technology for Region Program (Iptekda LIPI) 2000-2011 in West and East Java written by Dhian Kusumawardhani, 2016). *KnE Social Sciences*, 3(10), 43. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2904>
- Arifin, F., & Kurniadi, B. (2024). Implementation of the Development Planning Deliberation Policy (Musrenbang) in Sumur Bandung Sub District. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(1), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6130/http>
- Dahmiri, D., Bhayangkari, S. K. W., & Khalik, I. (2021). Pengaruh Kualitas Produk dan Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing UMKM Kuliner di Masa Pandemi Covid-19. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 434. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.401>
- Dahmiri, D., Khalik, I., & Oktari, A. (2024). Optimalisasi Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah Kreatif Dengan Model Quintuple Helix Terintegrasi Teknologi Digital Untuk Penguatan Smart City Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(04), 1229–1242. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i04.37128>
- Devi, S. M., & Ismail, H. (2024). Analisis Pelaksanaan Pengentasan Keluarga Miskin Dalam Perspektif Street Level Birokrasi (Studi Pengetasan Keluarga Miskin di Kelurahan Wonorejo Tegalsari). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(01), 114–126. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1324>
- Ditlopo, P., Blaauw, D., Rispel, L. C., Thomas, S., & Bidwell, P. (2013). Policy implementation and financial incentives for nurses in South Africa: a case study on the occupation-specific dispensation. *Global health action*, 6, 135–146. <https://doi.org/10.3402/gha.v6i0.19289>
- Djajanto, L., Kusmintarti, A., Wakhidah, R., Amerieska, S., & Ismanu, S. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Inovasi Produk Unggulan dan Pemasaran On-Line. *Empowerment Society*, 4(2), 57–60. <https://doi.org/10.30741/eps.v4i2.729>
- Donny, A., & Kurniawan, B. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca COVID-19. *Journal Publika*, 11, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1965-1982>
- Fajriyah, L. N., Afrizal, & Sophia, U. (2025). Implementasi Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Batam. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 327–337. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.1016>
- Fauziah, S. E. (2021). Partisipasi PLUT Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Kabupaten Bulungan. *JIMEA, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen,*

- Ekonomi, dan Akuntansi*, 5, 1674–1690.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1313>
- Fuadi, S. I., Anisa, I. F., Ramadina, A. S., Pujiyanto, R., Amin, S., Dinasti, L., Khikmah, L., Ihsan, A., Jannah, F. A. N., Arti, F. E., Nurngaeni, H., Hakim, M. L., & Faza, M. H. (2023). Pendampingan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Desa Beran, Kepil, Wonosobo. *Communnity Development Journal*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i1.12614>
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, S. E., & Basron. (2024). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7, 99–118.
<https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v7i1.253>
- Indriyani, L., Zaini, M., Hartono, T., Paselle, E., & Surya, I. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip di Kota Balikpapan. *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 15(02), 94–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/gjkmp.v15i2.323>
- Irmawati, Rahmawati, R., & Rusliandy. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar. *JAKP: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9, 168–184.
<https://doi.org/10.25077/ja>
- Iskandar, D. T., Sumartono, & Domai, T. (2017). *Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v13i1.273>
- Izmi, D. S., Yulaicho, M. R., & Nawangsari, E. R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 702–710. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.729>
- Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). *Cosmogov (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>
- Khasanah, N., Azizah, S., & Susilo, A. (2024). International Journal of Current Science Research and Review Evaluation of the Free Halal Certification Program (SEHATI) for Processed Livestock Micro and Small Enterprises (MSEs) in Blitar Regency. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i5-71>
- Khasna, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 28–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1573>
- Khosiah, Hajrah, & Syafril. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1, 141–148.
<https://doi.org/dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.219>
- Khususmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarrisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–724.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2543>
- Lubis, P. M. S., & Sihombing, T. (2024). SAJJANA: Public Administration Review Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Go Digital Di Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 02(02), 1–14. <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>
- Madani, M., Irvan Nur Iva, M., & Amiruddin, I. (2021). Peran Street Level Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 333–343.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6406>

- Mahardhika, I. N., Widanti, N. P. T., Widnyani, I. A. P. S., & Bidul, I. A. S. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. *eCo-Buss*, 7(2), 1229–1239. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1720>
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Marsuyetno, & Harahap, R. H. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 3, 271–292. <https://doi.org/10.31289/jap.v3i1.191>
- Meage, T., Ohoiwutun, Y., & Aedah, N. (2025). Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Dalam Pemekaran Distrik & Kampung di Kabupaten Yahukimo. <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/jkp.v8i3.4960>
- Miranda, S., Hidayat, A., & Dila Sari, A. (t.t.). Pendampingan IKM dalam Ecoprinting dan Digital Marketing. Dalam *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)* (Vol. 07). Diambil 22 Desember 2025, dari <https://journal.uui.ac.id/JAMALI/article/view/38570>
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran)*, 3(1). <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538>
- Narayana, A. A. N. S., Wijaya, K. A. S., & Gek Aris Veratiani. (2025). Implementasi Kebijakan e-Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(6), 1–10. <https://doi.org/10.61292/shkr.295>
- Nazifah, M. N., & Ikhwan, K. (2021). Analisis Faktor Kendala Industri Kecil Menengah (Studi Pada IKM Makanan di Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium*, 7(1), 55–71. https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v7i1.515
- Panjaitan, V. E. (2021). Implementasi Kebijakan New Normal Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan LIPI Bandung. Dalam *Jurnal Enersia Publika* (Vol. 4, Nomor 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v4i2.795>
- Paramita, C., Barokah, I., Diana, S., Farah, A., Dewi, D., Cahyani, D. W., & Manajemen, J. (2024). Pendampingan UMKM Tooku Tooku: Pengembangan Manajemen Bisnis dan Penguatan Branding Produk. *Jurnal Abdimas PHB*, 7, 1047–1055. <https://doi.org/https://doi.org/10.30591/japhb.v7i4.5111>
- Pratiwi, M. A. (2022). The Differences Between Theoretical Framework and Conceptual Framework in Scientific Research. *Idealog: Ide dan Dialog Desain Indonesia*, 7(2), 199–210. <https://doi.org/10.25124/idealog.v7i2.5014>
- Prianto, A., & Sulhan, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Industri di Jawa Timur Yang Berwawasan Sumber Daya Manusia Dalam Sustainability Development. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 61–68. <https://doi.org/10.26905>
- Putra, R. A., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2021). Analisis Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil di Medan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8(1). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.32>
- Putra, R. I. M., & Kurnia, A. C. (2025). Peran Pendampingan UMKM terhadap Penguatan Strategi Bisnis Lokal di Era Digital. *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(4), 789–794. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i4.1160>

- Ramadona, D. D., & Ajidin, A. (2024). Implementasi Kebijakan One Village One Product (OVOP) Terlaksana Pada Kampung Rendang Di Kota Payakumbuh. *Journal Publicuho*, 7(3), 1460–1470. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.505>
- Rokhman, K. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken dan Desa Sanggereman Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 6, 454–462. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6647>
- Signe, L. (2017). *Implementation-A synthesis of the Study of Policy Implementation and the Causes of Policy Failure Policy Paper*. <https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1703.pdf>
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 111–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*, 2(6), 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v2i6.339>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier. *Edu Research*, 5(3). <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Suwandi, Y. W. (2024). Improving the Competence of SMEs Customers through Mentoring: Holding BRI and PT Permadani Nasional Mandiri. *Journal of Community Development in Asia*, 7, 25–36. <https://doi.org/10.32535/jcda.v7i1.2849>
- Syofya, H. (2024). Analisis Nilai Tambah untuk Meningkatkan Keberlanjutan Rantai Pasok Agroindustri Kopi di Kabupaten Kerinci. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4556 – 4568. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.5216>
- Tasya, R., Purnamasari, H., & ... (2022). Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2317>
- Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. *Journal Unair*, 4, 1–10. <https://journal.unair.ac.id/KMP@kebijakan-publik-yang-tidak-terimplementasikan--studi-kasus-peraturan-pemerintah-nomor-74-tahun-2014-tentang-angkutan-jalan-pada-perubahan-kepemilikan-angkutan-article-10893-media-138-category-8.html>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *ADMINISTRATION & SOCIETY*, 64, 445–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Syntax Idea*, 3(5), 1205. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1194>
- Yolanda, N. (2022). Proses Penyusunan Perundang-undangan Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris," VI*, 48–55. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/415>